

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2025-2029 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2025-2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

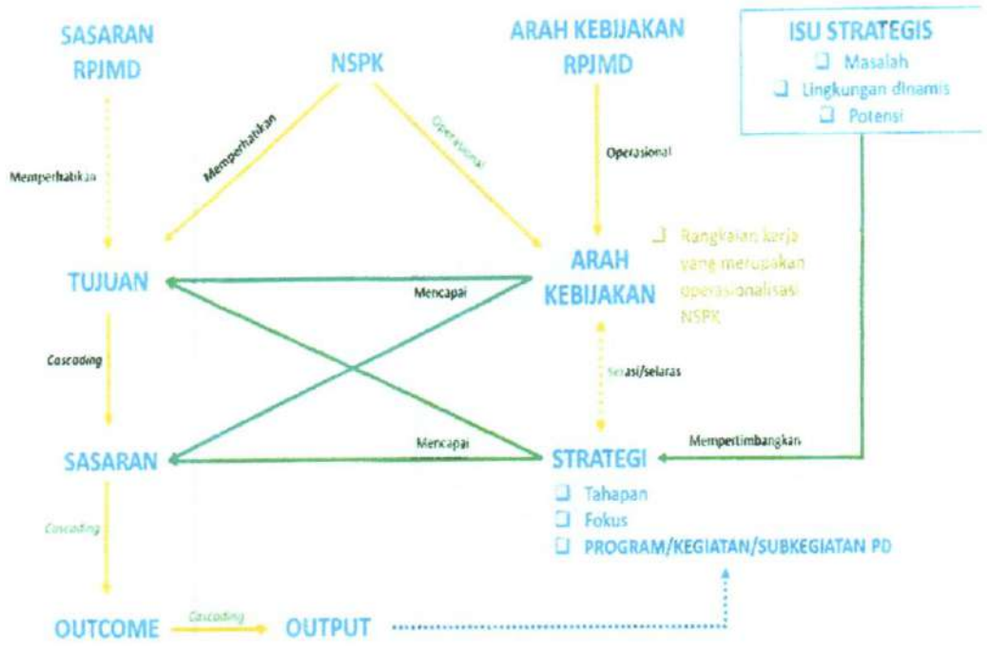
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas PD untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sesuai bagan dibawah.

Bagan 1.1 Konsep Renstra PD



Sumber Data : *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*

Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan:

(a) Evaluasi hasil capaian kinerja RPJMD dan Renstra PD periode sebelumnya;
(b) Permasalahan dan Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
(c) Regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.
(d) Penyelarasan dengan prioritas RPJPD 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029, RPJMN dan RPJMD Provinsi;
(e) Program, kegiatan dan subkegiatan pada renstra merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output;
(f) Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja kecamatan dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu penyusunan renja PD Tahun 2030.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan

Perangkat Daerah. Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tantang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan; dan
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan
   a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
   b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
   c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya
   d. Kelompok Sasaran Layanan;
   e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan;

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Darah
   a. Identifikasi Permasalahan;
   b. Perumusan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

Kecamatan Patianrowo memiliki luas wilayah 3.559,30 Ha dengan Desa yang terjauh dari Kecamatan Patianrowo adalah Desa Bukur yaitu 7 Km dengan ketinggian dari permukaan laut 55 m dengan curah hujan rata-rata per tahun 235 mm.

Secara administratif, Kecamatan Patianrowo terdiri dari 11 desa yaitu:

1. Desa Bukur
2. Desa Babadan
3. Desa Ngepung
4. Desa Pisang
5. Desa Lestari
6. Desa Pecuk
7. Desa Patianrowo
8. Desa Pakuncen
9. Desa Rowomarto
10. Desa Ngrombot
11. Desa Tirtobinangun

Adapun luas masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

LUAS WILAYAH KECAMATAN PATIANROWO PER DESA

No	Desa	Luas (Ha)
1.	Bukur	438,71
2.	Babadan	631,21
3.	Ngepung	102.160,63
4.	Pisang	186,45
5.	Lestari	65,64
6.	Pecuk	178
7.	Patianrowo	93,42
8.	Pakunceng	153

No	Desa	Luas (Ha)
9.	Rowomarto	743,31
10.	Ngrombot	160,63
11.	Tirtobinangun	438,77
	Jumlah	105.249,77

Sumber Data : Monografi dan Profil Kecamatan Tahun 2024

Secara geografis Kecamatan Patianrowo berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lengkong
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Patianrowo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Baron

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Patianrowo

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bukur	2.372	2.318	4.690
2	Babadan	1.158	1.151	2.309
3	Ngepung	2.622	2.535	5.157
4	Pisang	4.295	4.120	8.415
5	Lestari	2.827	2.694	5.521
6	Pecuk	4.377	4.180	8.557
7	Patianrowo	181	169	350
8	Pakuncen	1.081	1.093	2.174
9	Rowomarto	1.838	1.798	3.636
10	Ngrombot	1.711	1.667	3.378
11	Tirtobinangun	764	748	1.512
	Jumlah Penduduk	23.266	22.473	45.699

Sumber data : Profil Kependudukan Kecamatan Patianrowo Tahun 2024

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Patianrowo.

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

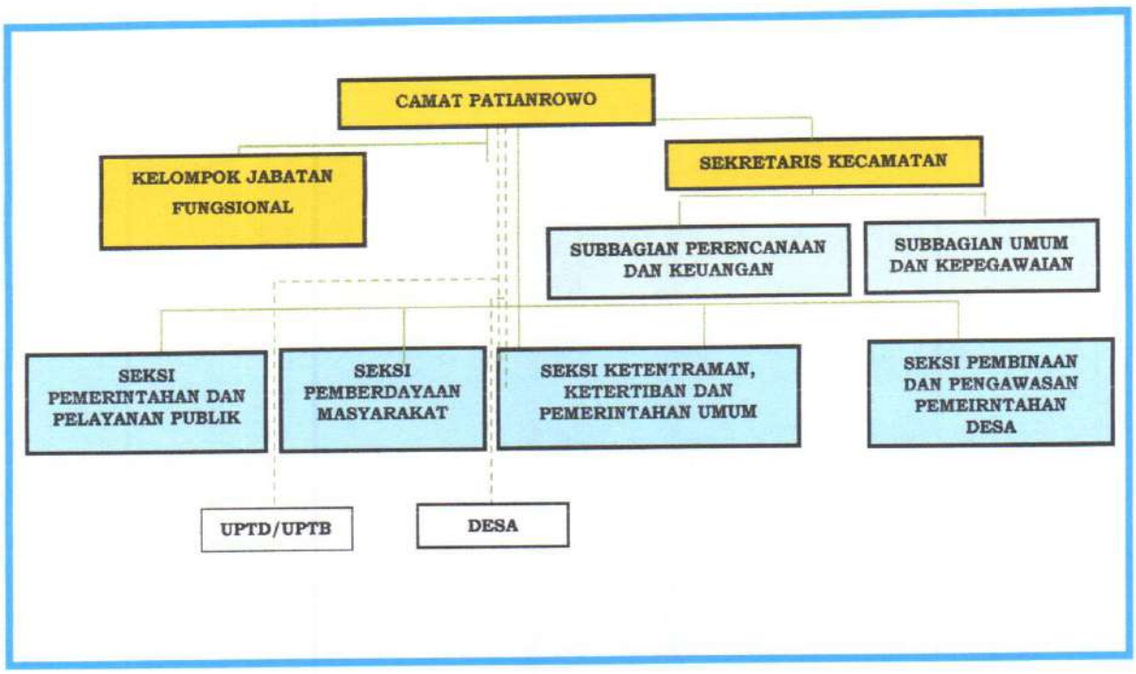
   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

   a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
   c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
   e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
   f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
   h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
   i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3. Struktur Organisasi

   Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Patianrowo adalah Kecamatan dengan Tipe A.

   Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
7. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
9. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
10. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
2. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
4. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan

7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

b.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Patianrowo adalah sebagai berikut:

b.2. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Patianrowo sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 4 (empat) jabatan struktural dan 4 (empat) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 7 (tujuh) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-
3.	Kepala Seksi	1	1	2
4.	Kasubbag	1	-	1
5.	Pelaksana/PNS	7	-	7
6.	Non ASN	2	4	6
Jumlah		12	5	17

Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Tahun 2025

b.3. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Patianrowo sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki- Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk.1	IV/b	1	-	1
2.	Pembina	IV/a	-	-	-
3.	Penata Tingkat I	III/d	1	1	2
4.	Penata	III/c	-	-	-
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	-	1
6.	Penata Muda	III/a	1	1	2
6.	Pengatur Tk. I	II/d	2	-	2
7.	Pengatur	II/c	1	-	1
8.	Pengatur Muda	II/a	1	-	1
Jumlah			8	2	10

Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Tahun 2025

b.4. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Patianrowo dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	1	-	1
2.	S1	3	2	5
3.	SMA	4	-	4
	JUMLAH	8	2	10

Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Tahun 2025

b.5. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
   - Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
     - 1 unit mobil avanza velos Tahun 2024
   - Roda dua sebanyak 2 (dua) unit yaitu :
     - Honda Supra X125 Tahun 2007
     - Yamaha Vixion Tahun 2014
4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
   - Meja Kerja : 34 buah
   - Meja layanan : 1 buah
   - Kursi : 50 buah
   - Kursi Tunggu : 2 buah
   - Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
   - Komputer : 6 (enam) unit
   - Laptop : 5 (lima) unit
   - Mesin Ketik : 2 (dua)
   - Printer : 8 (delapan) unit
   - TV : 3 (tiga) unit
   - Kursi Sofa : 1 (satu) unit
   - Kursi Tamu : 1 (satu) unit

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Patianrowo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel c.1. dan Tabel c.2. dengan format sebagai berikut:

Tabel c.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				92	92	93	94,64	-	-	102,86		
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan				10	10	10	14,29	-	-	143%		

Sumber: Laporan Evaluasi Renja PD Tahun 2024

Tabel c.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,384,193,700	2,367,239,393	2,414,584,715	2,236,902,076	-	-	93.82%	-	-		
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,662,800	72,974,800	74,434,600	84,483,382	-	-	83.93%	-	-		

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	188,411,520	55,544,600	56,656,400	165,614,810	-	-	87.90 %	-	-		
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	93,964,600	66,621,800	67,953,800	85,557,000	-	-	91.05 %	-			
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125,164,650	87,607,000	89,359,000	121,980,000	-	-	97.46 %				
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	251,696,000	205,808,500	209,923,500	214,924,100	-	-	85.39 %	-	-		

Sumber: Evaluasi Renja 2024

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel c.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel c.3, kita dapat mengetahui bahwa pada semua target telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Patianrowo.

Sedangkan pada table c.3., kita dapat mengetahui bahwa pada Tahun 2024, rasio antara anggaran dan realisasi khususnya pada program Program Penyelenggaraan Ketententraman Dan Ketertiban Umum adalah sebesar 58,61 dengan predikat Rendah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar 66,75 dengan predikat Sedang. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat kekosongan struktural yaitu Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dirangkap oleh Kasi Binwas dan juga Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan kosong semua di rangkat oleh Pelaksana Pengadministrasi Keuangan. Karena kekosongan structural tersebut mengakibatkan kinerja menjadi tidak maksimal.

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Patianrowo

No	Desa	PAUD/ TK	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/ Pamong Belajar	Perpustakaan
1	Bukur	5	4	1	1	-	1	-	-	-
2	Babadan	1	4	1	1	-	1	-	-	-
3	Ngepung	5	5	1	-	-	1	-	-	-
4	Pisang	3	3	-	-	-	-	-	-	-
5	Lestari	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Pecuk	1	3	-	1	-	-	-	-	-
7	Patianrowo	2	2	-	-	-	-	-	-	-
8	Pakuncen	1	-	-	1	-	1	-	-	-
9	Rowomarto	2	4	1	-	-	2	-	-	-
10	Ngrombot	1	2	-	-	-	-	-	-	-
11	Tirtobinangun	3	4	1	-	-	1	-	-	-
	JUMLAH	25	32	5	4	-	7	-	-	-

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Patianrowo

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	Bukur	-	-	-	-	1	-
2	Babadan	-	-	-	1	1	-
3	Ngepung	-	1	-	-	1	1
4	Pisang	-	-	-	-	1	-
5	Lestari	-	-	-	-	1	-
6	Pecuk	-	-	-	-	1	-
7	Patianrowo	-	-	1	1	1	1
8	Pakuncen	-	-	-	-	1	-
9	Rowomarto	-	-	-	-	1	-
10	Ngrombot	-	-	-	-	1	-
11	Tirtobinangun	-	-	-	1	1	-
	JUMLAH	-	1	1	3	11	1

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Patianrowo

No	Desa	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1	Bukur	36	6	8	9	4	7	32
2	Babadan	20	4	5	9	11	13	32
3	Ngepung	60	21	9	9	9	18	31
4	Pisang	19	8	7	9	5	9	62
5	Lestari	13	7	5	9	2	9	30
6	Pecuk	27	10	9	10	5	9	36
7	Patianrowo	15	8	5	9	4	8	33
8	Pakuncen	2	1	5	7	1	7	31
9	Rowomarto	33	5	9	10	5	25	25
10	Ngrombot	16	4	5	7	3	27	31
11	Tirtobinangun	12	8	9	10	7	20	32
	JUMLAH	253	82	76	98	56	152	375

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Patianrowo

No	Desa	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
1	Bukur	1	-	-	-	1	-
2	Babadan	1	-	-	-	1	-
3	Ngepung	1	-	-	-	1	-
4	Pisang	1	-	-	-	1	-
5	Lestari	1	-	-	1	1	-
6	Pecuk	1	-	-	-	1	-
7	Patianrowo	1	-	1	1	1	-
8	Pakuncen	1	-	-	-	1	-
9	Rowomarto	1	1	-	1	1	-
10	Ngrombot	1	-	-	-	1	-
11	Tirtobinangun	1	-	-	-	1	-
	JUMLAH	11	1	1	3	11	-

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Data Infrastruktur Desa di Kecamatan Patianrowo

No	Desa	Jalan (km)	Jembatan (unit)	Drainase (km)	Embung
1	Bukur				
2	Babadan				
3	Ngepung				
4	Pisang				
5	Lestari				
6	Pecuk				
7	Patianrowo				
8	Pakuncen				
9	Rowomarto				
10	Ngrombot				
11	Tirtobinangun				
	JUMLAH				

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Patianrowo

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1	Bukur	-	2	1	1
2	Babadan	-	1	1	2
3	Ngepung	1	1	1	3
4	Pisang	-	1	1	3
5	Lestari	-	1	1	2
6	Pecuk	-	1	1	3
7	Patianrowo	-	2	1	3
8	Pakuncen	1	1	1	2
9	Rowomarto	-	1	1	2
10	Ngrombot	1	1	1	3
11	Tirtobinangun	-	1	1	3
	Jumlah	3	13	11	27

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Patianrowo Tahun 2024

No	Desa	Anjal/gepeng	minuman beralkohol	Galian Minerba	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Perkalahian
1	Bukur	-	-	-	-	-	-	-
2	Babadan	-	-	-	-	-	-	-
3	Ngepung	-	-	-	-	-	-	-
4	Pisang	-	-	-	-	-	-	-
5	Lestari	-	-	-	-	-	-	-
6	Pecuk	-	-	-	-	-	-	-
7	Patianrowo	-	-	-	-	-	-	-
8	Pakuncen	-	-	-	-	-	-	-
9	Rowomarto	-	-	-	-	-	-	-
10	Ngrombot	-	-	-	-	-	-	-
11	Tirtobinangun	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Patianrowo Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Konflik social di Kec. Patianrowo
	Kec. Patianrowo	6

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Patianrowo Tahun 2024

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APBDesa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)	RKA Kelurahan (Jumlah Dokumen)	Laporan Keuangan Kelurahan (Jumlah Dokumen)
1	Bukur	1	1	1	1	1	1	-	-
2	Babadan	1	1	1	1	1	1	-	-
3	Ngepung	1	1	1	1	1	1	-	-
4	Pisang	1	1	1	1	1	1	-	-
5	Lestari	1	1	1	1	1	1	-	-
6	Pecuk	1	1	1	1	1	1	-	-
7	Patianrowo	1	1	1	1	1	1	-	-
8	Pakuncen	1	1	1	1	1	1	-	-
9	Rowomarto	1	1	1	1	1	1	-	-
10	Ngrombot	1	1	1	1	1	1	-	-
11	Tirtobinangun	1	1	1	1	1	1	-	-
	JUMLAH	11	11	11	11	11	11	-	-

Sumber Data : Seksi BinwasDes

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Patianrowo Tahun 2024

No.	Jenis pelayanan	Tahun 2024
	Adminduk capil	456
	Perijinan	12
	Administrasi lainnya	16

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Patianrowo Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2024
1	Kecamatan Sehat	1
2	Kecamatan Layak Anak	1
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	2
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	1
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	4
6	Kemiskinan	2

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

DATA DAN INFORMASI

Penjelasan Metadata Terkait Indikator Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk selaku Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patianrowo merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Patianrowo dalam menetapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Strategis Renstra serta Untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan. Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Nganjuk.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Patianrowo adalah meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima yang memiliki indikator Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan ditunjang oleh 2 (dua) sasaran yaitu, Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.

Tabel Metadata Indikator Kinerja

NO.	INDIKATOR KINERJA	METADATA
1	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	- Konsep: Aplikasi SINCAN - Definisi: Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah penilaian umum yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk, meliputi penilaian Administrasi, penilaian Presentasi, dan penilaian Tinjau Lapang dalam rangka untuk mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan 7 aspek peniaian - Ukuran: Indeks - Satuan: Nilai - Klasifikasi: - - Rumus Perhitungan: Hasil penilaian sinergitas oleh Tim Penilai - Interpretasi: Semakin baik indeks sinergitas, maka tata Kelola pemerintah di Kecamatan semakin baik
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	- Konsep: Aplikasi E SUKMA JATIM - Definisi: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang hasilnya diperoleh setiap tribulan, dimana koresponden mengisi link SKM melalui url: https://sukma.jatimprov.go.id/login - Ukuran: Indeks - Satuan: Nilai - Klasifikasi: - - Rumus Perhitungan: Hasil IKM melalui E SUKMA JATIM - Interpretasi : Semakin tinggi IKM, maka masyarakat akan semakin puas dengan kinerja pelayanan di Kecamatan.
3	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	- Konsep: Keterbukaan Informasi Publik - Definisi: Pemantauan dan pengawasan terhadap adanya pelanggaran trantibum - Ukuran: Persentase - Satuan: Persen - Klasifikasi: - - Rumus Perhitungan: (Jumlah pelanggaran tahun lalu-Jumlah pelanggaran tahun ini /Jumlah pelanggaran tahun lalu) x 100%

		- Interpretasi: Semakin turun pelanggaran, maka suatu wilayah menjadi semakin aman.

Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	77	64,70	84,02
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Kinerja Tahun 2024**		
			Target	**Realisasi**	**Capaian**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	92	94,64	102,86%
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	10 %	14,29%	143 %

Data pada table tersebut di atas diperoleh berdasarkan Laporan LKJIP Kecamatan Patianrowo Tahun 2024, dimana terdapat 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis, dengan capaian Tujuan sebesar **84,02%** ini didapat dari hasil penilaian Sinergitas Kecamatan sebagaimana surat dari Sekretariat Daerah No. 100/2820/411.000/2024 dengan nilai 64,70.

A. Tujuan Kecamatan Patianrowo Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan

Dari penilaian sinergitas kecamatan terealisasi 64,70 dari target sebesar 77. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum mencapai target. Dalam penilaian sinergitas tersebut terdapat 7 aspek, diantaranya sebagai berikjut :

1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

Dalam dalam hasil penilaian sinergitas kinerja kecamatan (SKK) tahun 2024 dari 7 aspek tersebut ada salah satu aspek yang tidak mendapat nilai pada aspek nomer 5, karena kecamatan patianrowo pada tahun 2023 belum memiliki inovasi/kreativitas sehingga mempengaruhi hasil nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK).

B. Sasaran strtegis yang kesatu

Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 94,64 % dari target sebesar 92,00 % . Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Patianrowo melebihi target :

1. Persyaratan (U1)

   Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku terealisasi 98,80 %.
2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

   Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Patianrowo sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat terealisasi 99,34%.
3. Waktu Penyelesaian (U3)

   Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan terealisasi 99,60%.
4. Biaya/Tarif (U4)

   Biaya dalam pengurusan surat-surat dan Pelayanan di Keacamatan Patianrowo tidak dikenakab biaya/gratis terealisasi 99,89%.
5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

   Jenis Pelayanan di Kecamatan Patianrowo antara lain :
   a. Pembuatan Akte Kelahiran
   b. Pembuatan Kartu Keluarga
   c. Perekaman KTP
   d. Pelayanan Pindah tempat
   e. Pembuatan dispensasi nikah

f. Pembuatan PPAT

g. Pelayanan Hak Waris

h. Pelayanan rekomendasi kredit bank

i. Pelayanan Legalisasi surat surat

Untuk jenis Pelayanan mencapai 99,34%.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)

Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, terealisasi 99,45%.

7. Perilaku Pelaksana (U7)

Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan terealisasi 99,89%.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)

Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR terealisasi 99,78%.

9. Sarana dan Prasarana (U9);

Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Patianrowo sudah tersedia dengan kondisi yang baik terealisasi 99,56%.

Dengan Demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Patianrowo sampai akhir tahun 2024 terealisasi 94,64%. (Bukti Dukung Pada Lampiran 4)

C. Sasaran startegis yang kedua yaitu meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan realisasi sebesar 14,29 % dari target sebesar 10 %. Capaian kinerjanya 143 % Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut telah mencapai target.

Angka tersebut dapat diperoleh dari :

Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2023 sejumlah 7 Laporan dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2024 sejumlah 6 Laporan

Dengan demikian realisali Kinerjanya :

$\frac{7 - 6 = 1}{7} \times 100 = 14{,}29\ \%$

Sedangkan Capaiannya $= \frac{\text{realisai}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{14{,}29}{10} \times 100 = 143\ \%$

Capaian kinerjanya sudah tercapai namun masih perlu adanya koordinasi kegiatan penanganan pelanggaran trantibum di kecamatan Patianrowo bersama tokoh masyarakat, perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait yaitu forpimcam dan perlu untuk secara kontinyu mengadakan sosialisasi tentang trantibum.

Adapaun target yang telah ditentukan terlalu kecil sehingga capaian kinerja terlalu tinggi.

Tabel Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No.	Tujuan	Indikator	Tingkat Kemajuan (%)	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	82,95	Tercapai
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Tingkat Kemajuan (%)**	**Tercapai/ Tidak Tercapai**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	101,76	Tercapai
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	143	Tercapai

Dari Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dapat simpulkan bahwa :

1. Dalam capaian indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun 2024 sebesar 84,02 dari target 77 maka bisa dikatakan dapat tercapai.
2. Sasaran yang kesatu Capaian IKM di kecamatan Patianrowo pada tahun 2024 sebesar 102,86 % dari target 92 % maka dikatakan dapat tercapai. Hal ini dalam capaian kinerja dalam meningkankan pelayanan public dapat dikatakan berhasil. Adapun penyebab keberhasilan dikarenakan dalam pelayanan telah dilakukan :

   dengan baik yaitu dengan Motto Pelayanan Kecamatan Patianrowo "SADIS"

   a. Santun
   b. Akuntabel
   c. Dedikasi
   d. Ihklas
   e. Senyum

penyebab Keberhasilan dalam pelayanan masyarakat di antaranya :

1. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP
2. Dalam memberikan pelayanan di lakukan dengan senyum, sapa dan sabar sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik
3. Dilakukan komunikasi dengan baik dengan pemohon apabila persyaratan kurang lengkap

3. Sasaran yang kedua meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 14,29 % dari target 10 % maka dapat dikatakan bahwa target sudah tercapai. Penyebab keberhasilan dalam mencipkatan penurunan gangguan trantibun di wilayah Kecamatan Patianrowo dikarenakan terciptanya keharmonisan antara Muspika, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib. Upaya untuk tahun kedepan lebih ditingkatkan lagi dalam menekan gangguan trantibum di wilayah Kecamatan Patianrowo supaya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

Tabel Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Ketengan	Faktor Penyebab / Uapaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			77	64,70	84,02%	Penilaian dari Sekda Kab. Nganjuk	-
2	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Nilai SAKIP Kecamatan	**75**	**67,25**	**89,66**	Berita acara penilaian SAKIP	
3			***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun***	***12 Dokumen***	***12 Dokumen***	***100%***	Tercukupinya 12 Laporan di Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Jumlah laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
4			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1. Dokumen Renstra 2024 2. Dokumen Renja 2024 3. Dokumen RKA 4. Dokumen DPA	

			Perangkat Daerah						
5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%	1. Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Perangkat Daerah Tribulan I, II, III dan IV Tahun 2024 Kec. Patianrowo	
6			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%	1. Laporan Dokumen LKJiP 2. Laporan Penilaian SAKIP 3. Laporan LKPJ 4. Laporan Penilaian Sinergitas	
7			***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***62 Dokumen***	***3 Dokumen***	**41,94%**	Tercukupinya 3 Dokumen di Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 2. Jumlah Laporan keungan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Untuk kedepannya akan diperbaiki terkait target yang ditetapkan

8			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	26 Orang/bulan	11 Orang/bulan	46,15%	Daftar Gaji dan penerimaan Gaji masing-masing ASN	Masalah dalam penentuan target, seharusnya sesuai dengan jumlah pegawai yang ada
9			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 Dokumen	-	0%		Tidak direalisasikan karena dalam merencakan tidak memahami tentang kegiatan tersebut. Kedepannya akan diperbaiki dalam menentukan kegiatan maupun tergetnya.
10			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keungan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Laporan penyusunan keuangan akhir tahun 2024	-

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	100%	1. Laporan rekon bulanan di Bidang Akuntansi 2. Laporan bulanan tentang pembelian/pengadaan barang dan jasa di Bidang Aset	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***51 Dokume n***	***2 Dokume n***	***21,56%***	Tercukupinya 2 Dokumen di Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja : 1. Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
3			Peningkatan Sarana dan Prasarana Displin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan senam pagi di kecamatan	
4			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	-	0%		Karena kegiatan di PAK sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksana kan. Kedepann ya akan di perbaiki terkait

									penentuan kegiatan dan terget
15			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9 orang	50 orang	100%	Laporan kegiatan rapat sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dalam penentuan target perlu diperbaiki untuk kedepannya sehingga dapat tercapai
16			***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***7 Dokumen***	***7 Dokumen***	***100%***	Tercukupinya 7 Dokumen di Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja : 1. Jumlah paket komponen listrik / penerangan bangunan kantor yang di sediakan 2. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 3. Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan 4. Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan 5. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dn Konsultasi SKPD 7. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

17			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik / penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Paket Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan	
18			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket	100%	Paket peralatan dan perlengkapan kantor pembelian bendera dan tali bendera	
19			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket berita acara penyelesaian pengadaan/pembelian (ATK, Kertas, Bahan computer, Perabot kantor, Air mineral dan mamin rapat)	
20			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	0 Paket	0%		Yang dijalankan hanya SPJ ATK. Maka kedepannya akan dilakukan kegiatan pelayanan umum di bidang sarpras se-kecamatan patianrowo
21			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%	Laporan jumlah tamu yang berkunjung ke Kecamatan Patianrowo dari Kapolres Nganjuk	-

22			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dn Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan perjalanan dinas luar daerah	-
23			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen penataan arsip dinamis SKPD	-
24			***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan***	***14 Unit***	***9 unit***	***64,29%***	Tercukupinya 9 unit di Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja : 1. Jumlah paket mebel yang disediakan 2. Jumlah unit perlengkapan dan mesin lainnya yang disediakan	Karena dalam penentuan terget masih salah. Untuk kedepannya akan dilakukan dicermati lagi untuk targetnya.
25			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 Unit	4 unit	47,14%	BAST pengadaan barang : 1. Karpet 2. Kursi rapat 3. Kursi staf 4. Meja rapat	Salah dalam menentukan target perencanaan. Untuk kedepannya akan dicermati lagi dalam penentuan target

26			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perlengkapan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit	5 unit	71,48%	BAST pengadaan barang : 1. CCTV 2. AC 3. Laptop 4. Komputer 5. Kipas Angin	Salah dalam menentukan target perencanaan. Untuk kedepannya akan dicermati lagi dalam penentuan target
27			***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tersedianya Jasa Penunjang SKPD***	***24 Laporan***	***24 Laporan***	***100%***	Terpenuhi	-
28			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	Laporan agenda surat keluar dan surat masuk	-
29			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi , sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Laporan rekap jasa air dan listrik	-
30			***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara***	***12 Unit***	***10 unit***	***83,33%***	Tercukupinya 10 unit di Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja : 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2. Jumlah Mebel yang Dipelihara 3. Jumlah peralatan dan	

								mesin lainnya yang dipelihara 4. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	
31			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 unit	100%	1. Pemeliharaan mobil Phanter 2. Pemeliharaan sepeda motor supra 3. Pemeliharaan sepeda motor Vixion	
32			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	2 unit	75%	BAST pemeliharaan mebel	Kurang maksimalnya dalam penyerapan anggaran sehingga target sudah ditentukan tidak tercapai. Untuk kedepannya akan dimaksimalkan lagi untuk penyerapan anggaran sehingga targetnya terpenuhi

33			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	3 unit	60%	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara dengan servis seperti : 1. AC 2. Laptop 3. Computer	Kurang maksimalnya dalam penyerapan anggaran sehingga target sudah ditentukan tidak tercapai. Untuk kedepannya akan dimaksimalkan lagi untuk penyerapan anggaran sehingga targetnya terpenuhi
34			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	1 unit	100%	BAST pemeliharaan Gedung kantor berupa pengecatan kantor dan plavon	-
35			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib***	**83%**	**85,71%**	**103,26%**		

36			***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***8 Laporan***	**8 Laporan**	**100%**		
37			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Laporan	8 Laporan	100%	1. Laporan kegiatan monitoring pemasukan PBB 2. Laporan kegiatan rapat PBB 3. Laporan kegiatan rapat PUG 4. Laporan kegiatan rapat kemiskinan ekstrim 5. Laporan kegiatan rapat PBB 6. Laporan kegiatan rapat PUG 7. Laporan kegiatan rapat PBB 8. Laporan Hasil Pemasukan PBB	
38			***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***	**Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	***3 Dokumen***	**1 Dokumen**	33,33%		
39			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%	Dokumen rapat	Didalam kegiatan tersebut hanya ada kegiatan rapat saja

			Pelayanan Umum	dan Prasarana Pelayanan Umum					
40			***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliompahkan Kepada Camat***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***3 Laporan***	***2 Laporan***	***66,66%***		
41			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	2 laporan	66,66%	1. Laporan kegiatan rapat FKP 2. Laporan kegiatan rapat FGD	Yang di jalankan hanya 2 kegiatan, kedepannya akan di evaluasi untuk targetnya
42			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**85%**	**143%**	143%		
43			***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan***	***97 Lembaga Kemasyarakatan***	***106 Lembaga Kemasyarakatan***	***137,66%***		

44			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	77 *Lembaga Kemasyarakatan*	106 *Lembaga Kemasyarakatan*	137,66%	1. Jumlah Lembaga yang mengikuti rapat musrenbang tingkat kecamatan 2. Laporan kegiatan rapat DTKS	
45			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	20 Dokumen	19 Dokumen	95%	1. Dokumen laporan PKK 11 Desa Kecamatan 2. Dokumen laporan PKK Kecamatan 3. Laporan kegiatan rapat UMKM 4. Dokumen laporan kegiatan rapat PKK (Pleno PKK, Rapat Pengurus)	Salah dalam menentukan target perencanaan. Untuk kedepannya akan dicermati lagi dalam penentuan target
46			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1 laporan	100%	Laporan penyelesaian penyaluran bantuan kepada balita stunting	-
47	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**66%**	**57,75%**	**87,50%**		

48			***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	***8 Laporan***	***7 Laporan***	**87,50%**		
49			Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	3 Laporan	75%	1. Laporan kegiatan rapat Linmas dilaksanakan 2 kali 2. Laporan kegiatan rapat Sosialisasi Bahaya Narkoba	Kurang maksimalnya dalam penyerapan anggaran sehingga target sudah ditentukan tidak tercapai. Untuk kedepannya akan dimaksimalkan lagi untuk penyerapan anggaran sehingga targetnya terpenuhi
50			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	1 Laporan	100%	Laporan kegiatan pengajian	Dalam kegiatan tersebut salah dalam menentukan target. Kedepannya akan dicermati lagi dalam menentukan

									sebuah terget, sehingga dapat tercapai
51	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**81%**	**49,25%**	**60,80%**		
52			***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan***	***250 Orang***	***152 orang***	**60,80%**		
53			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	250 Orang	152 orang	60,80%	Daftar Hadir Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Telah mengundang 180 orang akan tetapi yang hadir hanya sampai dengan 152 orang. Kedepannya akan lebih aktif untuk mengajak

			Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					warga dalam mengikuti pembinaan kebangsaan
54			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**80%**	**81%**	**101,25%**		
55			***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang***	***11 Desa***	***11 Desa***	***100%***		
56			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka administrasi tata Pemerintahan Desa	66 Dokumen	20 Dokumen	30,30%	1. Dokumen kegiatan rapat BPD 2. Dokumen kegiatan rapat operator desa 3. Dokumen kegiatan rapat RAPBdes 4. Dokumen kegiatan rapat APBdes 5. Dokumen kegiatan rapat konferensi perangkat desa 6. Dokumen kegiatan rapat EPDESKEL 7. BA monitoring pembinaan keuangan desa	Dalam kegiatan tersebut Sebagian digunakan untuk kegiatan rapat

57			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	2 dokumen	66,66%	1. Dokumen kegiatan rakor pembangunan sarpras desa (Aset Desa) 2. Dokumen kegiatan rapat profil desa 3. Dokumen kegiatan rapat RKPDes	Dalam kegiatan terebut hanya digunakan untuk kegiatan rapat saja

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Patianrowo adalah masyarakat dan desa/kelurahan di Kecamatan Patianrowo.

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Patianrowo dalam pemberian layanan adalah Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, yang bertugas melakukan koordinasi dan fasilitasi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Patianrowo menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/ *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Patianrowo adalah Kecamatan dengan Tipe A. Selain itu juga didasarkan pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Nganjuk ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Patianrowo;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Patianrowo yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan.
4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang.

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

b. Perumusan Isu Strategis

Pada Subbab 3.1 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangakt Daerah khususnya Kecamatan Patianrowo, yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Patianrowo, yaitu:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.
3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan*

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Patianrowo guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

5) *Keamanan dan Ketertiban di Wilayah*

Masih tingginya angka kriminalitas dan masih rendahnya keterlibatan semua pihak baik masyarakat, polisi, dan kecamatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan menjadi faktor penting untuk menurunkan angka pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

TABEL TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PATIANROWO

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Peningkatan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	ketahanan terhadap perubahan iktim, kerusakan dan penumbuhan kualitas lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam	Konflik bersenjata, ancaman lingkungan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem, diinformasi dan polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi dan potensi kemerosotan ekonoimi global	Pengentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan infrastruktur dan digitali desa, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, pencegahan dan penanganan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur antar wilayah, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi lokal	• Pemanfaatan ruang kebiiakan penyerahan Sebagian dari kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat di bidang Pemerintahan/Pembangunan untuk mendayagunakan potensi yang ada di wilayah, • Optimalisasi peran serta dan partisipasi Masyarakat dan kalangan dunia

				stunting serta penguatan BUMDes yang berkelanjutan		usaha dan swasta di Wilayah • Pelayanan Pima • Peningkatan Sinergitas Kecamatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Patianrowo dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Patianrowo adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan* yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Nilai Sinergitas Kecamatan.*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1. berikut:

3.1. Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Patianrowo											
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	64,7	77	77	78	78	79	79	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	94,64	92	92	93	93	94	94	
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	14,29	10	10	10	8	8	8	
		Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	98	100	100	100	100	100	100	

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Patianrowo dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah

"MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban;
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi local;
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna;
7. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan local.

Sedangkan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029, antara lain :

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran
2. Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
4. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan
10. Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup
12. Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM
14. Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga Nganjuk di perantauan
15. Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)

Kecamatan Patianrowo sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Patianrowo dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua) yakni Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Patianrowo memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Patianrowo, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
3. Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
8. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah
10. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.
11. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
12. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM
13. Meningkatkan Inovasi/kreativitas kecamatan pada segala aspek

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang baik dan pelayanan publik yang inovatif	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	
			- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan - Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah - Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah - Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah	

			- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM - Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	
			- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan	
			Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Patianrowo selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Patianrowo. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Patianrowo akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN FINAL RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Patianrowo							
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan				Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya data kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencaaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Patianrowo		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Patianrowo		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Patianrowo		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Patianrowo		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan			Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)		
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Patianrowo		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Patianrowo		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Patianrowo		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Meningkatnya tertib administrasi desa			Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		
			Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Patianrowo		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya tertib administrasi kelembagaan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Patianrowo		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					4.199.256.500,00		4.207.630.800,00		4.312.130.800,00		4.397.030.800,00		4.903.606.600,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.445.281.500,00		3.552.980.800,00		3.656.980.800,00		3.710.880.800,00		4.217.380.800,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	70	70	71	3.445.281.500,00	72	3.552.980.800,00	72	3.656.980.800,00	73	3.710.880.800,00	74	4.217.380.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					106.150.000,00		106.150.000,00		106.150.000,00		106.150.000,00		106.150.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	N/A	N/A	81	75.500.000,00	82	75.500.000,00	85	75.500.000,00	87	75.500.000,00	88	75.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	N/A	N/A	81	25.000.000,00	82	25.000.000,00	85	25.000.000,00	87	25.000.000,00	88	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	N/A	N/A	81	5.650.000,00	82	5.650.000,00	85	5.650.000,00	87	5.650.000,00	88	5.650.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					74.325.000,00		74.500.000,00		74.500.000,00		74.500.000,00		74.500.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	N/A	N/A	80	74.325.000,00	82	74.500.000,00	85	74.500.000,00	87	74.500.000,00	88	74.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					58.500.000,00		59.000.000,00		59.500.000,00		60.500.000,00		60.575.800,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	N/A	N/A	80	52.500.000,00	82	52.500.000,00	83	52.500.000,00	85	52.500.000,00	87	52.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	N/A	N/A	80	6.000.000,00	82	6.500.000,00	83	7.000.000,00	85	8.000.000,00	87	8.075.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					450.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	N/A	N/A	81	450.000.000,00	81	350.000.000,00	82	350.000.000,00	83	380.000.000,00	85	380.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Patianrowo	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	N/A	N/A	80	15.000.000,00	82	15.000.000,00	85	15.000.000,00	87	15.000.000,00	90	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Patianrowo	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	N/A	N/A	80	50.000.000,00	82	50.000.000,00	85	50.000.000,00	87	50.000.000,00	90	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					4.199.256.500,00		4.207.630.800,00		4.312.130.800,00		4.397.030.800,00		4.903.606.600,00	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.199.256.500		4.207.630.800		4.312.130.800		4.397.030.800		4.903.606.600		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.445.281.500		3.552.980.800		3.656.980.800		3.710.880.800		4.217.380.800		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	70	71	3.445.281.500	72	3.552.980.800	72	3.656.980.800	73	3.710.880.800	74	4.217.380.800	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Patianrowo	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.854.000		14.104.000		14.604.000		14.604.000		15.104.000		
Tersusunnya data kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	9.104.000	1	9.104.000	1	9.104.000	1	9.104.000	1	9.104.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.776.000		1.776.000		1.776.000		1.776.000		1.776.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	1	1.776.000	1	1.776.000	1	1.776.000	1	1.776.000	1	1.776.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.328.000		7.328.000		7.328.000		7.328.000		7.328.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	7.328.000	1	7.328.000	1	7.328.000	1	7.328.000	1	7.328.000		
Tersusunnya dokumen perencaaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2	4.750.000	2	5.000.000	3	5.500.000	2	5.500.000	2	6.000.000		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.750.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000		6.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2	4.750.000	2	5.000.000	3	5.500.000	2	5.500.000	2	6.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.761.504.000		2.861.504.000		2.961.504.000		3.011.504.000		3.511.504.000		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	13	2.761.504.000	13	2.861.504.000	13	2.961.504.000	13	3.011.504.000	13	3.511.504.000		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	26		26		26		26		26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.750.000.000		2.850.000.000		2.950.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	26	2.750.000.000	26	2.850.000.000	26	2.950.000.000	26	3.000.000.000	26	3.500.000.000		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.504.000		3.504.000		3.504.000		3.504.000		3.504.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	13	3.504.000	13	3.504.000	13	3.504.000	13	3.504.000	13	3.504.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	2	4.200.000	2	4.200.000	2	4.200.000	2	4.200.000	2	4.200.000		
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		4.200.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	2	4.200.000	2	4.200.000	2	4.200.000	2	4.200.000	2	4.200.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.183.700		41.733.000		43.733.000		46.733.000		51.733.000		
Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	50	35.183.700	50	41.733.000	50	43.733.000	50	46.733.000	50	51.733.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	26		26		26		26		26			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				9.533.700		11.083.000		11.083.000		11.083.000		11.083.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	9.533.700	1	11.083.000	1	11.083.000	1	11.083.000	1	11.083.000		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				20.000.000		25.000.000		27.000.000		30.000.000		35.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	26	20.000.000	26	25.000.000	26	27.000.000	26	30.000.000	26	35.000.000		
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5.650.000		5.650.000		5.650.000		5.650.000		5.650.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	50	5.650.000	50	5.650.000	50	5.650.000	50	5.650.000	50	5.650.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				152.939.800		153.839.800		155.339.800		156.239.800		157.239.800		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	103.515.800	1	104.015.800	1	105.015.800	1	105.015.800	1	105.015.800		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.397.600		19.897.600		20.897.600		20.897.600		20.897.600		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	19.397.600	1	19.897.600	1	20.897.600	1	20.897.600	1	20.897.600		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.288.000		13.288.000		13.288.000		13.288.000		13.288.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	13.288.000	1	13.288.000	1	13.288.000	1	13.288.000	1	13.288.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.405.200		55.405.200		55.405.200		55.405.200		55.405.200		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	55.405.200	1	55.405.200	1	55.405.200	1	55.405.200	1	55.405.200		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.425.000		15.425.000		15.425.000		15.425.000		15.425.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	15.425.000	1	15.425.000	1	15.425.000	1	15.425.000	1	15.425.000		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	49.424.000	1	49.824.000	1	50.324.000	1	51.224.000	1	52.224.000		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.600.000		8.600.000		8.600.000		9.000.000		9.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	8.600.000	1	8.600.000	1	8.600.000	1	9.000.000	1	9.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.224.000		35.224.000		35.224.000		35.224.000		35.224.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	35.224.000	1	35.224.000	1	35.224.000	1	35.224.000	1	35.224.000		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.600.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		8.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	5.600.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	8.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7	7	145.000.000	7	145.000.000	7	145.000.000	7	145.000.000	7	145.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	7		7		7		7		7			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7	7	60.000.000	7	60.000.000	7	60.000.000	7	60.000.000	7	60.000.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	7	85.000.000	7	85.000.000	7	85.000.000	7	85.000.000	7	85.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				113.900.000		113.900.000		113.900.000		113.900.000		113.900.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	2	113.900.000	2	113.900.000	2	113.900.000	2	113.900.000	2	113.900.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				88.900.000		88.900.000		88.900.000		88.900.000		88.900.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2	88.900.000	2	88.900.000	2	88.900.000	2	88.900.000	2	88.900.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				218.700.000		218.700.000		218.700.000		218.700.000		218.700.000		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	218.700.000	5	218.700.000	5	218.700.000	5	218.700.000	5	218.700.000		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	10		10		10		10		10			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.200.000		6.200.000		6.200.000		6.200.000		6.200.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	6.200.000	5	6.200.000	5	6.200.000	5	6.200.000	5	6.200.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				106.150.000		106.150.000		106.150.000		106.150.000		106.150.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	80	81	25.000.000	82	25.000.000	85	25.000.000	87	25.000.000	88	25.000.000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Patianrowo	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	80	81	5.650.000	82	5.650.000	85	5.650.000	87	5.650.000	88	5.650.000		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				5.650.000		5.650.000		5.650.000		5.650.000		5.650.000		
Terlaksananya fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2	2	5.650.000	2	5.650.000	2	5.650.000	2	5.650.000	2	5.650.000		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				5.650.000		5.650.000		5.650.000		5.650.000		5.650.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2	2	5.650.000	2	5.650.000	2	5.650.000	2	5.650.000	2	5.650.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	80	81	75.500.000	82	75.500.000	85	75.500.000	87	75.500.000	88	75.500.000		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				75.500.000		75.500.000		75.500.000		75.500.000		75.500.000		
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	8	2	75.500.000	2	75.500.000	2	75.500.000	2	75.500.000	2	75.500.000		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				65.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	8	2	65.500.000	2	65.500.000	2	65.500.000	2	65.500.000	2	65.500.000		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				74.325.000		74.500.000		74.500.000		74.500.000		74.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	80	80	74.325.000	82	74.500.000	85	74.500.000	87	74.500.000	88	74.500.000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Patianrowo	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				74.325.000		74.500.000		74.500.000		74.500.000		74.500.000		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	20	1	49.825.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				49.825.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	20	1	49.825.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	85	9	24.500.000	9	24.500.000	9	24.500.000	9	24.500.000	9	24.500.000		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				24.500.000		24.500.000		24.500.000		24.500.000		24.500.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	85	9	24.500.000	9	24.500.000	9	24.500.000	9	24.500.000	9	24.500.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				58.500.000		59.000.000		59.500.000		60.500.000		60.575.800		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	80	80	6.000.000	82	6.500.000	83	7.000.000	85	8.000.000	87	8.075.800	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Patianrowo	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6.000.000		6.500.000		7.000.000		8.000.000		8.075.800		
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	-	4	6.000.000	4	6.500.000	4	7.000.000	4	8.000.000	4	8.075.800		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6.000.000		6.500.000		7.000.000		8.000.000		8.075.800		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	-	4	6.000.000	4	6.500.000	4	7.000.000	4	8.000.000	4	8.075.800		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	80	80	52.500.000	82	52.500.000	83	52.500.000	85	52.500.000	87	52.500.000		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				52.500.000		52.500.000		52.500.000		52.500.000		52.500.000		
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	52.500.000	4	52.500.000	4	52.500.000	4	52.500.000	4	52.500.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				450.000.000		350.000.000		350.000.000		380.000.000		380.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Patianrowo	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	80	81	450.000.000	81	350.000.000	82	350.000.000	83	380.000.000	85	380.000.000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Patianrowo	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				450.000.000		350.000.000		350.000.000		380.000.000		380.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	250	771	450.000.000	350	350.000.000	350	350.000.000	400	380.000.000	400	380.000.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				450.000.000		350.000.000		350.000.000		380.000.000		380.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	250	771	450.000.000	350	350.000.000	350	350.000.000	400	380.000.000	400	380.000.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Patianrowo	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	80	80	15.000.000	82	15.000.000	85	15.000.000	87	15.000.000	90	15.000.000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Patianrowo	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Meningkatnya tertib administrasi kelembagaan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	3	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	3	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Patianrowo	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	80	80	50.000.000	82	50.000.000	85	50.000.000	87	50.000.000	90	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	66	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	66	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000		

4.2. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Patianrowo										
I	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	64,7	77	77	78	78	79	79	

TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Patianrowo				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Patianrowo	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Patianrowo	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Patianrowo	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Patianrowo	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Patianrowo	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Patianrowo	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Patianrowo	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Patianrowo	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Patianrowo	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Patianrowo menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2025 sampai tahun 2029. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Patianrowo									
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	64,7	77	77	78	78	79	79	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	94,64	92	92	93	93	94	94	
4.	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	14,29	10	10	10	8	8	8	
5.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	98	100	100	100	100	100	100	

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK

Dengan didapatnya Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Patianrowo adalah Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintah kecamatan dengan Indikator Kinerja Kunci : **Nilai Sinergitas**

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI FINAL RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Positif	Nilai	64,7	77	77	78	78	79	79	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Kecamatan Patianrowo.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001